



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : KEMANTREN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAJWAN TAUFIQ
2. Jabatan : MANTRI PAMONG PRAJA
3. NHK : 508955

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.440.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 274.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRANDLIVINA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 33.391.713

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.747.391.713



III. HUTANG

Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.297.391.713

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.